



Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

Muhammad Kafnun Kafi¹, Sapiudin², Zahra Khusnul Lathifah³

¹Universitas Djuanda Bogor

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³Universitas Djuanda Bogor

¹e-Mail : Kafnunkafi@gmail.com

²e-Mail : sapiudin@uinjkt.ac.id

³e-Mail : Zahra.khusnul.latifah@unida.ac.id

Abstrak: Moderasi beragama telah menjadi wacana krusial di tengah meningkatnya ekstremisme dan intoleransi, baik di ranah global maupun nasional. Indonesia sebagai negara majemuk sangat membutuhkan moderasi dalam beragama untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis SARA. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep *moderasi beragama* dalam konteks kontemporer, dengan menyoroti definisi, landasan teologis, urgensi penerapannya di Indonesia dan dunia saat ini, serta tantangan dan strategi penguatannya. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka dari berbagai jurnal internasional dan sumber relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa moderasi beragama berakar pada nilai-nilai universal agama tentang keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Di Indonesia, upaya penguatan moderasi beragama telah dilakukan melalui kebijakan pemerintah dan peran ormas keagamaan arus utama, namun masih menghadapi tantangan seperti radikalisme, politik identitas, dan diskriminasi. Karena itu, diperlukan strategi terpadu melalui pendidikan, dialog antaragama, serta penegakan kebijakan yang adil untuk memperkuat moderasi beragama. Kesimpulannya, moderasi beragama merupakan kunci terciptanya kehidupan keagamaan yang damai dan inklusif di tengah keragaman masyarakat Indonesia dan dunia.

Keywords: Moderasi Beragama, Toleransi dan Keragaman, Radikalisme dan Intoleransi, Strategi Penguatan Moderasi

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu radikalisme dan intoleransi agama semakin mendapat perhatian serius di tingkat global maupun nasional. Penyebaran paham ekstrem yang mengatasnamakan agama telah berkembang menjadi masalah dunia. Di Indonesia, meskipun dikenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan memiliki tradisi pluralisme, berbagai laporan menunjukkan adanya tren peningkatan intoleransi terhadap kelompok minoritas. Misalnya, lebih dari 2.000 gereja dilaporkan telah ditutup sejak diberlakukannya regulasi tentang rumah ibadah, dan pada November 2020 sebuah desa mayoritas Kristen di Sulawesi diserang oleh kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan ISIS. Serangan tersebut menewaskan empat orang serta membakar beberapa rumah dan gereja, memaksa ratusan warga mengungsi. Contoh kasus seperti itu menunjukkan bagaimana ekstremisme dapat mengancam kerukunan dan keamanan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyadari ancaman tersebut dan telah menggalakkan program *Moderasi Beragama* melalui Kementerian Agama. Konsep ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meredam konflik berbasis agama dan mencegah penyebaran radikalisme. Menteri Agama RI menegaskan bahwa keragaman “*bukanlah dalih untuk konflik; tetapi kekayaan umat manusia. Keragaman adalah kekayaan*” . Pernyataan ini menegaskan pandangan bahwa perbedaan agama, budaya, dan etnis justru harus dilihat sebagai kekuatan pemersatu, bukan sumber pertikaian. Moderasi beragama pada hakikatnya mendorong sikap saling menghormati dalam bingkai persatuan bangsa.

Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan, menghindari ekstremitas, serta menaati konsensus bersama dalam kehidupan berbangsa. Kementerian Agama RI (2019) menjelaskan bahwa *moderasi beragama* adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengimplementasikan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan nasional . Lebih lanjut, ditegaskan bahwa “*moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama*” . Dengan kata lain, moderasi beragama tidak bermaksud mengubah ajaran pokok agama, melainkan menekankan pemahaman dan praktik beragama yang tidak berlebihan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama serta konstitusi. Kemenag RI mengidentifikasi empat indikator penguatan moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan ramah terhadap tradisi lokal. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah seseorang atau kelompok telah mengamalkan sikap beragama yang moderat dalam konteks kehidupan bernegara modern (Abdel-Fattah & Krayem, 2021) .

Secara teologis, gagasan moderasi beragama sejalan dengan konsep *wasatiyyah* dalam Islam, yakni jalan tengah yang menjauhi sikap ekstrem. Al-Qur’an mengajarkan umat Islam untuk menjadi “*ummatan wasatan*” (umat yang adil dan seimbang) sebagaimana disebut dalam QS Al-Baqarah [2]:143. Konsep *wasatiyyah* menekankan keseimbangan antara dua kutub berlebihan, baik dalam akidah, ibadah, maupun muamalah, sehingga umat Islam dapat menjadi teladan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat luas. Nilai-nilai serupa juga dapat ditemukan dalam ajaran agama lain, misalnya prinsip *Middle Way* (jalan tengah) dalam ajaran Buddha atau konsep kasih dan *temperance* (sikap menahan diri) dalam ajaran Kristen. Dengan demikian, moderasi beragama sesungguhnya merupakan nilai universal lintas agama yang bertumpu pada kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.

Indonesia memiliki warisan kuat praktik beragama yang moderat. Sejak awal abad ke-20, organisasi massa Islam utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dikenal mengusung Islam *wasathiyah* (moderat) dalam dakwah dan gerakannya. Kedua ormas ini berperan sebagai penjaga moderatisme Islam di Indonesia, mengajarkan keseimbangan antara teks dan konteks, antara ajaran agama dan realitas kebangsaan. Studi Masdar Hilmy (2013) mengkaji ulang visi moderat NU dan Muhammadiyah dan menyimpulkan bahwa ideologi kedua ormas tersebut pada dasarnya mendukung demokrasi, toleransi, dan anti-kekerasan dalam kehidupan berbangsa. Jejak moderasi ini juga tampak dari kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara dan terlibat aktif membangun pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi semua golongan tanpa diskriminasi agama. Dengan latar belakang inilah, wacana moderasi beragama mendapat tempat istimewa di Indonesia sebagai landasan menjaga kerukunan di tengah kemajemukan (Achilov & Sen, 2017) .

Meskipun demikian, konsep *Muslim moderat* tidak sepenuhnya luput dari kritik. Dalam diskursus global pasca-9/11, istilah "*Muslim moderat*" sering diangkat untuk mengkontraskan Muslim arus utama dengan segelintir ekstremis. Namun, beberapa pihak menganggap label ini problematis. Abdel-Fattah & Krayem (2021) berargumen bahwa tuntutan bagi umat Islam untuk terus membuktikan diri sebagai "moderat" justru dapat menjadi beban tersendiri dan gagal mengikis stereotip negatif terhadap Islam (Abdel-Fattah & Krayem, 2021). Kritik ini mengingatkan bahwa moderasi beragama tidak boleh dilihat sekadar sebagai pencitraan politik, melainkan harus dimaknai sebagai kesadaran internal setiap pemeluk agama untuk menjunjung nilai toleransi dan kemanusiaan. Terlepas dari polemik tersebut, sebagian besar cendekiawan sepakat bahwa penguatan moderasi beragama merupakan langkah penting untuk mencegah konflik dan kekerasan. Penelitian Achilov & Sen (2017) bahkan menunjukkan bahwa Muslim yang berpemahaman politik moderat memiliki perbedaan signifikan dibanding yang radikal, terutama dalam hal dukungan terhadap demokrasi, penolakan terhadap aksi kekerasan, serta keterbukaan pada kemajemukan. Hal ini menegaskan bahwa moderasi beragama berkorelasi positif dengan stabilitas sosial-politik dan perdamaian.

Berangkat dari latar belakang di atas, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai moderasi beragama dalam konteks kekinian. Fokus utamanya meliputi: pemahaman konsep dan landasan moderasi beragama, urgensi penerapannya di Indonesia dan dunia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam mengarusutamakan moderasi, serta strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat moderasi beragama. Semua pembahasan didasarkan pada studi pustaka terkini dari berbagai literatur dan hasil riset, guna memberikan gambaran komprehensif tentang praktik moderasi beragama sebagai salah satu kunci menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat majemuk.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari literatur sekunder yang relevan, terutama artikel-artikel pada jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan organisasi, serta regulasi pemerintah terkait moderasi beragama. Beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur antara lain "religious moderation", "moderasi beragama", "tolerance in Indonesia", dan "countering extremism". Kriteria pemilihan sumber difokuskan pada publikasi terkini (dekade terakhir) yang membahas konsep moderasi beragama dan implementasinya dalam konteks Indonesia maupun global (Nafsi & Octavia, 2024).

Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi terhadap berbagai pandangan konsep dan temuan empiris yang ada di literatur. Langkah-langkahnya meliputi: (1) membaca dan mengidentifikasi definisi, indikator, serta prinsip moderasi beragama yang dijelaskan para ahli; (2) mengumpulkan contoh-contoh kasus atau data empiris tentang kondisi kerukunan dan konflik keagamaan mutakhir; (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat moderasi beragama berdasarkan studi sebelumnya; dan (4) merumuskan strategi atau rekomendasi dari berbagai sumber yang dapat memperkuat moderasi beragama. Semua informasi yang dikutip dipastikan berasal dari sumber tepercaya dan dikutip sesuai gaya bodynote (nama penulis dan tahun). Melalui metode ini, penulis bermaksud menyajikan pembahasan yang integratif – menggabungkan landasan teoritis dan fakta empiris – untuk menjawab permasalahan mengenai moderasi beragama dalam konteks kontemporer (Fadli, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Landasan Moderasi Beragama

Istilah *moderasi beragama* merujuk pada upaya menempatkan praktik keberagamaan pada posisi tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan namun juga tidak mengabaikan prinsip agama. Secara konseptual, moderasi beragama memiliki landasan teologis dan sosiologis yang kuat. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan *wasatiyyah* (kesederhanaan atau jalan tengah). Al-Qur'an menegaskan umat Islam sebagai "*umat yang wasatan*" atau *ummatan wasatan*, yakni *umat pertengahan yang adil dan berimbang* (QS 2:143). Makna *wasat* di sini mencakup sikap hidup yang menghindari ekstrem di kedua kutub: tidak terlalu longgar dalam beragama hingga mengabaikan syariat, namun tidak pula ekstrem hingga melampaui batas kemanusiaan. Prinsip *wasatiyyah* menuntun umat untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan secara proporsional. Yusuf al-Qaradawi, ulama terkemuka yang banyak mengupas konsep *wasatiyyah*, menyebutkan bahwa ciri utama pola pikir Islam yang moderat dan seimbang adalah pemahaman agama yang menyeluruh dan kontekstual, tidak sempit pada satu sudut pandang. Dengan pemahaman yang holistik, umat tidak mudah terjerumus pada fanatisme yang sempit (Ahyar, 2019).

Konsep moderasi sebenarnya bukan hal baru dan tidak eksklusif milik Islam semata. Dalam khazanah Kristen, misalnya, terdapat ajaran tentang pentingnya kasih sayang dan *temperance* (menjaga keseimbangan diri) yang esensinya mirip dengan moderasi beragama, yaitu menghindari sikap ekstrem yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula dalam Hindu dan Buddha, dikenal *Dharma* dan *Majjhima Patipada* (Jalan Tengah) yang mengajarkan keseimbangan hidup jauh dari sikap ekstrem. Nilai-nilai kearifan lokal di Nusantara pun sarat dengan ajaran toleransi dan harmoni, seperti falsafah *tat wam asi* di Bali atau *Pepatah Minang "Alam takambang jadi guru"* yang mengandung makna kebijaksanaan dalam memetik pelajaran dari keragaman alam. Semua ini menunjukkan bahwa secara normatif, ajaran agama dan tradisi mengandung benih-benih moderasi. *Moderasi beragama* pada intinya adalah implementasi nyata dari ajaran tersebut dalam konteks kehidupan bersama yang majemuk (Akmaliah et al., 2024).

Dalam konteks Islam Indonesia, moderasi beragama telah lama menjadi karakter utama. Sejarah mencatat bahwa organisasi Islam *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah konsisten menempuh jalan tengah dalam banyak hal, mulai dari penafsiran teks agama hingga sikap terhadap budaya lokal dan negara bangsa. Kedua organisasi ini berperan besar dalam memajukan Islam moderat di Indonesia. Nahdlatul Ulama terkenal dengan prinsip *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *ta'adul* (keadilan) dalam praktik beragama, serta konsep *Islam Nusantara* yang menekankan Islam yang ramah budaya. Sementara Muhammadiyah mengusung slogan *Islam Berkemajuan* yang mendorong pembaruan (*tajdid*) dan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern, sembari tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang murni. Keduanya menerima Pancasila sebagai dasar negara dan berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan nasional, yang mencerminkan kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip kebangsaan Indonesia (nasionalisme). Kajian Hilmy (2013) tentang visi moderat Muhammadiyah dan NU menegaskan bahwa kedua ormas tersebut pada dasarnya mendukung demokrasi, keadilan, dan pluralisme dalam visi keagamaannya, meskipun menghadapi tantangan dinamika internal dan pengaruh gerakan transnasional. Dengan

Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

kata lain, landasan sosiologis moderasi Islam Indonesia telah diletakkan oleh para pendahulu melalui ormas- ormas tersebut.

Selain ormas keagamaan, pemerintah Indonesia juga turut merumuskan kerangka moderasi beragama dalam skala nasional. Azyumardi Azra (2015) menyatakan bahwa moderasi Islam di Indonesia berkembang dalam kerangka relasi antara negara dan masyarakat. Pemerintah (negara) sejak Orde Baru hingga Reformasi memiliki andil dalam membentuk kebijakan keagamaan yang moderat – misalnya, melalui Departemen (kini Kementerian) Agama yang menaungi semua agama resmi dan mengatur kehidupan beragama agar harmonis. Di sisi lain, masyarakat sipil melalui ormas dan tokoh agama berpengaruh menjadi pelaku langsung yang menggerakkan moderasi di akar rumput. Azra menekankan perlunya sinergi antara kebijakan struktural pemerintah dan gerakan kultural masyarakat dalam menjaga moderasi beragama. Contoh kongkritnya, di era Reformasi, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang mencegah penyebaran ajaran ekstrem (seperti pelarangan organisasi teroris dan kelompok anti-Pancasila), sementara masyarakat melalui ormas melakukan kontra-narasi terhadap ideologi radikal dan aktif dalam dialog antarumat (Arman, 2022) . Kerangka inilah yang terus berjalan hingga kini, meski menghadapi situasi zaman yang kian kompleks.

Tidak dapat dipungkiri, wacana *moderasi beragama* di Indonesia dewasa ini juga dipengaruhi oleh konteks global. Kampanye tentang Islam moderat sebagian muncul sebagai respons terhadap munculnya terorisme global yang mengatasnamakan agama Islam, terutama sejak awal 2000-an. Pemerintah Indonesia berupaya menegaskan bahwa Islam Indonesia adalah Islam moderat yang cinta damai, antara lain dengan berperan aktif dalam forum-forum antarnegara seperti *Alliance of Civilizations* di PBB dan mempromosikan konsep *Wasatiyyatul Islam* di dunia internasional. Para sarjana mencatat bahwa citra *Islam moderat* di Indonesia memang secara sengaja dibangun oleh berbagai pihak, termasuk negara dan tokoh agama, demi membentengi umat dari pengaruh radikal eksternal maupun untuk diplomasi internasional . Akmaliah dkk. (2022) menyebut proses ini sebagai “*making moderate Islam*” di Indonesia, di mana narasi Islam moderat dikonstruksi melalui kebijakan, media, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil kesadaran kolektif dan rekayasa sosial yang terus diupayakan agar melekat dalam identitas umat beragama di Indonesia (Asy’ari, 2021) .

3.2. Urgensi Moderasi Beragama dalam Konteks Kekinian

Mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting di masa kini? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengamati berbagai tantangan kontemporer yang terkait dengan kehidupan beragama. Pertama, ancaman radikalisme dan ekstremisme masih nyata adanya. Pasca Reformasi 1998, Indonesia mengalami kebebasan yang lebih besar, namun bersamaan dengan itu paham-paham Islam radikal yang dulunya terlarang mulai masuk dan mempengaruhi sebagian masyarakat. Masuknya ideologi transnasional berhaluan keras – sebagian diimpor dari konflik Timur Tengah – menyuburkan kelompok-kelompok ekstrem di dalam negeri. Dampak nyatanya terlihat dari rangkaian peristiwa teror, seperti bom Bali 2002 dan bom di Jakarta (JW Marriott 2003, 2009). Hal ini memberikan pelajaran bahwa keterbukaan politik tanpa diimbangi ketahanan ideologis dapat dimanfaatkan oleh kelompok garis keras untuk menyebarkan pengaruhnya. Moderasi beragama dibutuhkan sebagai benteng ideologis untuk menangkis penetrasi ajaran yang menyimpang dan mencegah kekerasan.

Kedua, potensi konflik sosial berbasis SARA (suku, agama, ras, antargolongan) masih menjadi kekhawatiran. Indonesia pernah mengalami tragedi konflik komunal seperti kerusuhan Poso dan Ambon di akhir 1990-an hingga awal 2000-an yang berakar pada sentimen keagamaan. Penelitian Ahmad Najib Burhani (2010) tentang kerusuhan Maluku mencatat bahwa lemahnya toleransi dan makin menguatnya identitas keagamaan eksklusif berkontribusi besar terhadap pecahnya konflik tersebut. Ribuan nyawa melayang dan komunitas yang dulunya hidup rukun terbelah karena provokasi sektarian. Kejadian serupa bisa terulang di daerah lain jika masyarakat tidak mengedepankan sikap moderat. Di sinilah urgensi moderasi beragama sebagai *preventive measure* untuk meredam potensi konflik. Masyarakat yang memegang teguh prinsip toleransi dan saling menghormati perbedaan akan lebih kebal terhadap provokasi kebencian (Afwadzi & Miski, 2021).

Ketiga, polarisasi politik identitas belakangan cenderung meningkat dan turut menyeret sentimen agama. Peristiwa *Aksi Bela Islam 2016-2017* yang dipicu isu penistaan agama dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh bagaimana agama dapat dijadikan alat mobilisasi politik yang memecah masyarakat sepanjang garis identitas. Muzayyin Ahyar (2019) menamai fenomena ini sebagai "*Islamic clicktivism*", di mana propaganda keagamaan dan politik menyebar masif melalui media sosial, menciptakan otoritas baru bagi tokoh agama populis di kalangan generasi milenial. Di era digital, misinformasi dan ujaran kebencian berbalut agama dapat dengan cepat membentuk opini publik yang mengeras, sehingga kelompok yang berbeda pandangan saling curiga dan memusuhi. Moderasi beragama menjadi penting untuk menangkal hal ini dengan cara mendorong sikap tabayyun (klarifikasi), berfikir kritis, dan tidak mudah terhasut provokasi. Selain itu, narasi moderat harus hadir di ruang digital untuk mengimbangi narasi ekstrem. Tanpa itu, ruang media online akan dikuasai suara-suara keras yang dapat memperdalam polarisasi.

Keempat, diskriminasi dan intoleransi struktural masih menjadi pekerjaan rumah. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, implementasinya kadang tersandung oleh regulasi dan kebijakan yang bias mayoritas. Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah, misalnya, mensyaratkan dukungan sebagian warga sekitar yang sering sulit dipenuhi minoritas, sehingga banyak gereja atau rumah ibadah lain kesulitan mendapatkan izin. Akibatnya, menurut laporan, lebih dari 2.000 gereja terpaksa tutup dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menggambarkan adanya tekanan sosial-politik yang menghambat minoritas beribadah secara leluasa. Belum lagi penggunaan pasal penodaan agama dan perda syariah di sejumlah daerah, yang dikritik karena rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas atau mengatur kehidupan pribadi warga. Kasus terkini seperti promosi minuman gratis bagi pelanggan bernama "Muhammad" di sebuah klub yang berujung tuntutan penodaan agama menunjukkan bahwa regulasi seperti pasal penodaan agama bisa memicu tindakan berlebihan yang mengancam kebebasan sipil. Dalam kondisi seperti ini, moderasi beragama diperlukan sebagai *mindset* bagi aparaturnya dan masyarakat, agar dapat menyikapi perbedaan secara arif tanpa mengorbankan keadilan (Burhani, 2013).

Selain faktor-faktor di atas, tantangan internal dalam komunitas agama sendiri juga tak kalah penting. Beberapa kalangan konservatif mengkhawatirkan bahwa agenda *moderasi beragama* dapat melemahkan kemurnian ajaran atau dianggap mendekati sinkretisme. Padahal, seperti telah dijelaskan Kemenag, moderasi beragama sama sekali bukan upaya mengurangi ketaatan beragama, melainkan mengarahkan pemahaman agar proporsional (tidak ekstrem). Stigma negatif terhadap istilah "moderat" ini harus diakui

Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

masih ada di sebagian kecil kelompok. Tantangan lainnya adalah generasi muda yang kurang mendapatkan pendidikan lintas agama. Jika kurikulum dan lingkungan tidak memberi ruang interaksi positif antarpemeluk agama, dikhawatirkan prasangka akan tumbuh subur. Fakta mengejutkan diungkap sebuah survei nasional: lebih dari 50% guru agama di Indonesia ternyata memiliki pandangan intoleran. Hal ini tentu *alarm* serius mengingat guru semestinya menjadi teladan moderasi bagi generasi muda. Jika para pendidik saja banyak yang bias atau eksklusif, dapat dibayangkan bagaimana pandangan siswa yang mereka ajar. Data ini semakin menegaskan betapa urgennya menerapkan moderasi beragama dalam sistem pendidikan dan penguatan kapasitas para pendidik (Hilmy, 2013).

Secara global, moderasi beragama juga berkontribusi pada perdamaian dunia. Dunia saat ini masih menyaksikan konflik berlatar belakang agama atau sektarian di berbagai kawasan – mulai dari ketegangan Sunni-Syiah di Timur Tengah, konflik agama di Afrika, hingga maraknya Islamofobia di negara Barat. Upaya membangun *dialogue of civilizations* akan berhasil jika di masing-masing pihak ada sikap moderat, mau mendengarkan, dan bersedia bekerja sama. Indonesia, dengan reputasinya sebagai negara Muslim demokratis dan plural, sering dijadikan model “*Islam moderat*” dunia. Tentu, tuntutan untuk menjaga predikat tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Moderasi beragama bukan semata agenda domestik, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia kepada komunitas global untuk turut menjaga perdamaian. Oleh sebab itu, urgensi moderasi beragama di era kini tidak dapat ditawar lagi. Ia adalah prasyarat bagi terwujudnya stabilitas dan keharmonisan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

3.3. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia

Indonesia telah mengambil berbagai langkah konkret dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu pilar utamanya. Kementerian Agama RI sejak 2019 menjadikan *Moderasi Beragama* sebagai program prioritas nasional. Buku panduan “*Moderasi Beragama*” diterbitkan dan didistribusikan sebagai rujukan bagi instansi terkait (Kementerian Agama RI, 2019). Lebih jauh lagi, Kemenag memasukkan indikator moderasi beragama dalam program kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyuluh agama. Menteri Agama berharap para ASN Kemenag dapat menjadi pelopor penguatan moderasi beragama, serta mengajak tokoh lintas agama, akademisi, pemuda, guru, dan penyuluh untuk bersama-sama menyebarkan nilai moderasi di tengah masyarakat (Ri, 2019). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, pelatihan dan *workshop* tentang moderasi beragama gencar dilakukan, misalnya diklat bagi penghulu, penyuluh, dan guru agama tentang cara menyisipkan pesan toleransi dalam tugas sehari-hari. Sektor pendidikan menjadi wahana strategis implementasi berikutnya. Kurikulum pendidikan agama di sekolah dan madrasah mulai direvisi untuk memasukkan perspektif moderasi. Misalnya, materi mengenai kerukunan, etika lintas agama, dan anti-radikalisme diperkuat (Robet et al., 2023). Guru-guru diberikan modul serta bimbingan agar mampu mengajarkan agama secara inklusif. Bahkan, nilai-nilai moderasi berusaha diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran umum. Penelitian menunjukkan bahwa nilai moderasi dapat disampaikan melalui pendekatan interdisipliner, contohnya analogi konsep dalam pelajaran Sains dan Sosial. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di bawah Kemenag juga menjadi ujung tombak, dengan mendirikan Pusat Studi Moderasi Beragama di kampus-kampus Islam.

Langkah-langkah ini diharapkan membentuk budaya sekolah dan kampus yang menghargai keberagaman dan kebebasan beragama.

Selanjutnya, dialog dan kerjasama antarumat beragama terus digalakkan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tiap daerah berperan aktif memfasilitasi komunikasi antara tokoh berbagai agama, terutama jika muncul friksi lokal terkait isu keagamaan. Berbagai kegiatan dialog lintas iman, seperti lokakarya, live-in antar pemuda lintas agama, hingga doa bersama lintas agama saat hari besar nasional, semakin sering diadakan. Langkah ini sejalan dengan saran Asy'ari (2021) untuk memperkuat moderasi beragama melalui dialog antaragama dan edukasi masyarakat tentang toleransi. Di tingkat nasional, pemerintah menginisiasi pertemuan tokoh lintas agama ketika ada kasus yang berpotensi mengganggu kerukunan, guna meredam situasi. Contohnya, ketika terjadi penodaan tempat ibadah atau konflik lokal, Kemenag bersama FKUB segera turun mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi damai. Secara kultural, tradisi lokal seperti *Safari Kebhinekaan* atau *Pesantren Kilat Lintas Agama* juga muncul sebagai inovasi masyarakat untuk saling mengenal budaya dan ibadah agama berbeda, yang semuanya bermuara pada penguatan sikap moderat (Jubba et al., 2021).

Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan pun melakukan langkah konkret. NU dan Muhammadiyah, sebagai dua ormas Islam terbesar, aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah maupun organisasi agama lain dalam program moderasi. NU dengan jaringan pesantrennya menerapkan pendidikan yang menekankan akhlak toleran dan cinta tanah air (Hilmy, 2013). Program *Islam Nusantara* mereka dorong sebagai kontra-narasi terhadap ideologi Islam transnasional yang puritan. Sementara Muhammadiyah menggerakkan dakwah komunitas yang inklusif lewat berbagai majelis, seperti Majelis Pendidikan, Majelis Pustaka dan Informasi yang menyebarkan konten Islam moderat di media, serta Majelis Dialog Antaragama. Kedua ormas ini juga terlibat dalam menyusun materi khutbah atau ceramah yang ramah bagi minoritas (Ri, 2019). Tidak hanya Islam, ormas agama lain seperti Persekutuan Gereja, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), Parisada Hindu Dharma, Walubi, dan Matakini pun ikut serta dalam kegiatan lintas iman. Mereka bersama-sama pemerintah mencanangkan program seperti *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* dan dialog rutin antar tokoh agama. Kolaborasi ormas lintas agama ini krusial untuk saling mendukung moderasi. Tokoh-tokoh karismatik dari berbagai agama juga berperan sebagai ikon moderasi. Misalnya (Alm.) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kalangan Muslim dikenal gigih membela minoritas dan mempromosikan pluralisme; Pastur Franz Magnis Suseno dari Katolik vokal menyerukan toleransi; Romo Banjaran dari Hindu, Pendeta A.A. Yewangoe dari Kristen, dan Bhikkhu Pannyavaro dari Buddha, semuanya aktif menyebarkan pesan damai. Figur-figur seperti mereka menjadi *role model* publik tentang bagaimana menjalankan ajaran agama secara moderat. Gus Dur khususnya, dianggap bapak pluralisme Indonesia, banyak jasanya dalam memelopori dialog antaragama sejak era Orde Baru.

Pada aspek regulasi dan penegakan hukum, pemerintah melakukan langkah tegas terhadap kelompok atau tindakan yang dianggap ekstrem. Undang-Undang Ormas 2017 digunakan untuk membubarkan ormas yang anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap menyebarkan paham khilafah transnasional. Aparat keamanan juga meningkatkan operasi kontra-terorisme melalui Densus 88/Antiteror Polri, sehingga banyak rencana serangan teroris berhasil digagalkan. Program deradikalisasi bagi narapidana terorisme dijalankan dengan melibatkan psikolog dan ulama moderat. Dalam program ini, eks-napiter dibina untuk kembali ke paham keagamaan yang toleran dan cinta

Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

damai, sebelum akhirnya diintegrasikan ke masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mulai lebih serius menertibkan ujaran kebencian di media sosial dengan UU ITE dan aturan turunan. Meskipun masih ada kritik bahwa penegakan hukum kadang tebang pilih, namun sedikit banyak langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga ruang publik tetap kondusif. Keberhasilan moderasi beragama memang tidak lepas dari dukungan kebijakan dan penegakan aturan yang adil. Jika aparat konsisten menindak pelaku kekerasan atau diskriminasi atas nama agama, maka kepercayaan publik terhadap prinsip moderasi akan menguat (Ma'mun et al., 2025).

Implementasi moderasi beragama juga merambah dunia media dan teknologi informasi. Pemerintah bekerja sama dengan pegiat media untuk menyebarkan konten positif lintas agama. Kampanye seperti *#JagaKerukunan* di media sosial, lomba vlog atau film pendek bertema toleransi, hingga penayangan iklan layanan masyarakat tentang kebinekaan di televisi, terus dilakukan. Konten-konten dakwah digital oleh ustaz-ustaz muda yang moderat juga mulai memenuhi platform seperti YouTube dan Instagram, menawarkan alternatif narasi keagamaan yang sejuk bagi generasi milenial. Ini semua bagian dari adaptasi implementasi moderasi beragama dalam menjawab tantangan era disrupsi informasi (Elvinaro & Syarif, 2021).

Secara umum, implementasi moderasi beragama di Indonesia berlangsung pada berbagai level: dari kebijakan negara, pendidikan, dialog masyarakat, gerakan ormas, hingga penggunaan media. Upaya ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kerukunan tidak terpelihara dengan sendirinya, melainkan perlu diikhtikarkan. Tentu, hasilnya tidak instan. Diperlukan kesinambungan dan evaluasi berkelanjutan. Namun demikian, strategi multi-level yang telah dan sedang dijalankan Indonesia ini sering dipuji dunia internasional sebagai *best practice*. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa implementasi tersebut benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meredam benih ekstremisme yang mungkin masih tersembunyi.

3.4. Tantangan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

Mewujudkan moderasi beragama di lapangan bukanlah perkara mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, baik yang bersifat konseptual, sosial, maupun struktural (Haryani, 2019). Berikut beberapa tantangan utama yang teridentifikasi:

- a) Pemahaman Yang Keliru tentang Moderasi: Sebagian kalangan konservatif atau fundamentalis melihat moderasi beragama dengan curiga. Mereka menganggap *moderasi* sebagai upaya “mengkompromikan” agama atau menjauhkan umat dari ajaran yang *hakiki*. Pandangan ini tentu keliru, namun cukup berpengaruh terutama di komunitas tertutup. Jika tidak diluruskan, mispersepsi ini dapat menghambat program moderasi karena tidak mendapat dukungan dari “grassroot” yang terdoktrinasi pemahaman sempit. Perlu upaya dakwah dan komunikasi yang tepat untuk menjelaskan bahwa moderat bukan berarti lemah iman, melainkan justru cara untuk mengamalkan ajaran agama secara bijak. Tokoh-tokoh agama yang disegani perlu dilibatkan untuk meluruskan anggapan ini.
- b) Kendala Struktural dan Hukum: Seperti disinggung sebelumnya, masih terdapat produk hukum dan kebijakan yang kurang selaras dengan semangat moderasi. Contohnya, regulasi pendirian rumah ibadah yang multitafsir dan implementasinya rawan diskriminasi. Begitu juga Pasal Penodaan Agama dalam KUHP yang kerap digunakan

secara bias dan justru menjadi alat bagi kelompok intoleran untuk membatasi ekspresi keyakinan pihak lain. Di beberapa daerah, terdapat peraturan daerah bernuansa agama mayoritas yang berpotensi mendiskriminasi minoritas (misalnya kewajiban berjilbab bagi siswi non-Muslim di sekolah negeri, larangan perayaan keagamaan tertentu, dll.). Kebijakan-kebijakan semacam ini menjadi tantangan karena bertentangan dengan semangat moderasi yang menghargai keberagaman. Selain itu, penegakan hukum terhadap aksi intoleransi kerap dianggap lemah. Pelaku pengrusakan rumah ibadah atau intimidasi terhadap kelompok agama minoritas sering mendapat hukuman ringan atau malah lolos dari jerat hukum, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Ketidakadilan semacam ini bisa melemahkan kepercayaan masyarakat pada pentingnya moderasi, karena hukum dianggap memihak kelompok mayoritas tertentu. Oleh sebab itu, reformasi kebijakan dan konsistensi penegakan hukum merupakan tantangan tersendiri yang harus diatasi agar moderasi beragama dapat berakar kuat (Aziz et al., 2019).

- c) Kurangnya Teladan dan Dukungan Sosial: Moderasi beragama membutuhkan keteladanan dari pemimpin formal maupun informal. Tantangannya, tidak semua tokoh agama atau pemuka masyarakat mau bersuara lantang mendukung moderasi. Sebagian mungkin takut kehilangan pengikut atau dipandang “kurang saleh” jika terlalu moderat. Apalagi, narasi kebencian cenderung lebih sensasional dan menarik perhatian dibanding pesan damai. Media massa pun kadang lebih banyak mengangkat kontroversi daripada keberhasilan dialog. Akibatnya, keberhasilan-keberhasilan kecil moderasi di lapangan kurang terekspos, sementara kasus intoleransi justru terkenal luas. Minimnya pemberitaan positif dapat membuat masyarakat pesimis, seakan-akan intoleransi mendominasi (Muzaky, n.d.) . Padahal, banyak komunitas di Indonesia yang hidup rukun dan saling membantu lintas agama, hanya saja kisahnya tenggelam. Ini menjadi tantangan bagi pegiat moderasi: bagaimana memperkuat support system sosial yang mendukung moderasi dan memastikan para influencer di masyarakat memberi teladan nyata. Inisiatif seperti Jaringan Gusdurian, Interfaith Youth Community, dan lain-lain sudah mulai muncul untuk memenuhi kebutuhan ini, meski skalanya masih terbatas.
- d) Dampak Globalisasi dan Teknologi: Era globalisasi dan internet bak pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan teknologi memudahkan penyebaran pesan moderasi ke audiens luas. Namun di sisi lain, arus informasi global juga membawa tantangan berupa culture shock dan benturan nilai. Arus globalisasi dapat memunculkan kegamangan identitas, yang kadang direspon sebagian orang dengan kembali pada konservatisme sempit sebagai bentuk resistance. Selain itu, fenomena echo chamber di media sosial membuat orang cenderung terpapar informasi sepihak yang menguatkan bias mereka. Seorang pengguna Facebook misalnya, jika sudah cenderung ke pandangan intoleran, akan tergabung dalam grup/halaman sejenis sehingga perspektifnya makin ekstrem. Moderasi beragama menghadapi tantangan menembus sekat-sekat echo chamber ini. Butuh inovasi dalam berdakwah dan berkomunikasi di platform digital agar pesan moderat bisa menjangkau kalangan yang terisolasi dalam gelembung informasi homogen. Tantangan teknologi juga mencakup hoaks dan teori konspirasi berbasis

Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

agama yang marak beredar. Contoh, hoaks tentang serbuan tenaga kerja asing “kafir” atau konspirasi pemurtadan massal – meski tidak berdasar, narasi seperti ini mudah menyulut kemarahan dan kecurigaan antar kelompok. Menangkalnya memerlukan literasi digital yang baik di kalangan masyarakat, yang tentu menjadi pekerjaan besar tersendiri.

Tantangan-tantangan di atas bukan untuk membuat pesimis, melainkan untuk dipahami demi merumuskan langkah antisipatif. Seperti diungkap Hasse Jubba dkk. (2021), ormas-ormas Islam di Indonesia menghadapi banyak kendala dalam mempromosikan moderasi, mulai dari tekanan kelompok radikal, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi internal. Namun, mereka juga memiliki modal sosial dan jaringan luas yang bisa dioptimalkan. Dengan mengenali rintangan, gerakan moderasi beragama dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3.5. Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Untuk mengatasi tantangan dan memperkuat moderasi beragama, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek (Muslim, 2023). Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Pendidikan Inklusif dan Kritis: Kurikulum pendidikan agama perlu terus direformasi agar berperspektif inklusif. Materi tentang toleransi, kebinekaan, dan anti-kekerasan harus terintegrasi sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pelatihan bagi guru sangat penting, mengingat mereka adalah garda terdepan pembentuk pola pikir anak muda. Guru perlu dibekali metodologi pengajaran yang mendorong penalaran kritis dan empati lintas agama. Selain itu, program pertukaran pelajar atau *live-in* ke komunitas berbeda agama bisa digalakkan, sehingga siswa memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan keberagaman. Pendekatan pendidikan seperti ini akan melahirkan generasi baru yang imun terhadap hasutan kebencian. Seperti dikatakan Alwi Shihab, jika tantangan intoleransi di dunia pendidikan tak diatasi, kita berisiko menghasilkan generasi muda yang intoleran di masa depan. Karena itu, membangun budaya sekolah yang inklusif dan menghargai perbedaan adalah kunci jangka panjang penguatan moderasi.
- b) Dialog dan Kolaborasi Antarumat: Dialog lintas agama harus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya. Bukan hanya dialog formal di tingkat elit, tetapi juga percakapan keseharian di akar rumput. Program “*kampung kerukunan*” atau “*desa binaan lintas iman*” dapat menjadi contoh, di mana komunitas lokal secara rutin mengadakan pertemuan ataupun kerja bakti bersama antara warga beda agama. Kolaborasi dalam kegiatan sosial seperti membantu fakir miskin, tanggap bencana, atau proyek lingkungan yang melibatkan berbagai kelompok agama juga efektif mempererat ikatan kebangsaan. Ketika umat berbeda bisa bekerja sama mencapai tujuan bersama, sekat-sekat stereotip akan mencair. Pemerintah dan ormas dapat memfasilitasi lebih banyak kegiatan lintas iman, misalnya melalui peringatan hari-hari besar secara bersama (*open house* saat Lebaran, Natal bersama, dll.). Pendekatan personal melalui persahabatan lintas iman juga perlu didorong, khususnya di kalangan pemuda milenial yang cenderung lebih terbuka. Dialog yang jujur dan setara akan menumbuhkan saling pengertian, sehingga perbedaan teologi tidak lagi dilihat sebagai ancaman. Penguatan Peran Ormas Keagamaan: Ormas dan lembaga keagamaan perlu terus dipacu menjadi motor moderasi.

- c) Reformasi Kebijakan dan Penegakan Hukum Adil: Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi yang berpotensi kontraproduktif terhadap moderasi. Penyesuaian Peraturan Rumah Ibadah bisa dipertimbangkan, misalnya dengan mekanisme yang lebih sederhana dan menjamin minoritas tidak dipersulit oleh “tirani mayoritas lokal”. Demikian pula, pasal-pasal karet tentang penodaan agama sebaiknya diperjelas kriteria dan batasannya agar tak mudah disalahtafsirkan. Langkah positif juga bisa berupa penerbitan peraturan yang melindungi keberagaman, contohnya peraturan anti-diskriminasi berbasis agama di tempat kerja atau sekolah. Sementara itu, aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dan keberpihakan pada keadilan. Tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan atau persekusi berbaju agama akan memberi sinyal kuat bahwa negara melindungi semua golongan. Kasus perusakan properti rumah ibadah, sweeping ormas, atau ujaran kebencian harus diproses hukum tuntas tanpa pandang bulu. Dengan tegaknya hukum, kelompok intoleran akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Masyarakat pun makin percaya bahwa pemerintah serius menjaga kerukunan, sehingga tidak mudah terprovokasi main hakim sendiri. Reformasi kebijakan dan penegakan hukum ini memerlukan komitmen berkelanjutan, namun dampaknya sangat signifikan dalam jangka panjang untuk ekosistem moderasi beragama.
- d) Optimalisasi Media dan Literasi Digital: Meraih “kemenangan” di ruang media sama pentingnya dengan di dunia nyata. Strategi moderasi harus mencakup kampanye media yang kreatif dan masif. Pemerintah dan komunitas pro-toleransi bisa menggandeng *influencer* media sosial untuk menyebarkan konten positif. Misalnya, membuat web series, film pendek, infografis, atau meme yang mengemas pesan kerukunan secara kekinian dan mudah dibagikan. Pendekatan humor atau budaya pop dapat digunakan agar pesan moderat lebih merakyat, terutama di kalangan anak muda. Di sisi lain, literasi digital perlu digalakkan agar warga mampu memilah informasi dan tidak termakan hoaks. Program literasi ini dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah serta pelatihan di masyarakat. Contoh, mengajari santri atau remaja masjid cara cek fakta berita, memahami algoritma media sosial, dan etika berdiskusi daring. Semakin banyak “pasukan” warganet yang melek digital dan berpikiran moderat, semakin efektif upaya kontra narasi terhadap propaganda kebencian. Pemerintah juga bisa memanfaatkan teknologi dengan mendukung pengembangan aplikasi atau situs yang mempromosikan dialog lintas agama, atau memantau percakapan publik untuk mendeteksi dini potensi konflik (Ulama, 2015) . Semua ini membutuhkan sinergi antara pakar teknologi, pemuka agama, dan pemerintah. Dengan strategi media yang tepat, *silent majority* yang moderat di masyarakat dapat terdorong bersuara dan tidak lagi kalah oleh kelompok ekstrem yang vokal.
- e) Penguatan Ekonomi dan Keadilan Sosial: Meskipun terdengar tidak langsung terkait, faktor kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial turut memengaruhi moderasi beragama. Ketimpangan dan ketidakadilan dapat menyuburkan rasa sakit hati yang kemudian dieksploitasi kelompok radikal. Oleh karena itu, strategi moderasi harus berjalan beriringan dengan upaya perbaikan ekonomi dan keadilan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan inklusif yang melibatkan semua kelompok, sehingga tidak ada yang merasa termarginalkan karena identitasnya. Di daerah rawan konflik, program kesejahteraan seperti padat karya lintas komunitas, pemberdayaan ekonomi umat lintas agama, dapat mengurangi tensi. Contohnya, di Maluku pasca konflik, program bersama rekonstruksi rumah dan pengembangan ekonomi yang melibatkan eks-pelaku

Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

konflik dari kedua belah pihak berhasil membangun rekonsiliasi. Ini membuktikan bahwa saat perut kenyang dan hidup sejahtera, orang lebih mudah diajak berpikir moderat ketimbang saat kondisi miskin dan frustrasi. Jadi, penguatan moderasi beragama hendaknya menjadi arus utama (mainstreaming) yang juga dipertimbangkan dalam kebijakan ekonomi-sosial (Hidayah, 2021).

Pada akhirnya, semua strategi di atas bermuara pada satu hal: *menempatkan kemanusiaan dan persatuan di atas perbedaan primordial*. Tantangan moderasi memang kompleks, sehingga pendekatan pun harus holistik. Indonesia memiliki modal besar berupa falsafah bangsa (Pancasila) dan pengalaman sejarah dalam mengelola kemajemukan. Tinggal bagaimana modal ini dioptimalkan melalui strategi- strategi konkrit seperti yang telah diuraikan (Rosyad et al., 2021). Perlu ditekankan bahwa moderasi beragama bukan tugas eksklusif pemerintah atau tokoh agama saja, melainkan tanggung jawab setiap individu pemeluk agama. Oleh karena itu, pendekatan personal seperti meningkatkan *self-awareness* tiap umat beragama juga penting – misalnya dengan refleksi bahwa fanatisme berlebihan justru bertentangan dengan esensi ajaran kasih sayang dalam agama apapun. Dengan kombinasi strategi struktural dan kultural, moderasi beragama dapat semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan jalan terbaik untuk menjaga keseimbangan antara kesalehan beragama dan keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk. Di tengah konteks kontemporer yang ditandai oleh arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya gesekan identitas, sikap beragama yang moderat menjadi kian relevan dan mendesak. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa moderasi beragama berpijak pada nilai-nilai inti semua agama yang mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Pengalaman Indonesia menggarisbawahi bahwa moderasi bukanlah konsep asing, melainkan telah lama hidup dalam praktik beragama masyarakat melalui ajaran wasatiyyah dan kearifan lokal.

Dalam konteks kekinian, moderasi beragama menghadapi tantangan serius seperti munculnya kembali paham ekstrem, politisasi agama, hingga kebijakan yang kurang mendukung keragaman. Meskipun demikian, upaya ke arah moderasi terus berjalan. Pemerintah, tokoh agama, ormas, pendidik, hingga komunitas akar rumput telah mengambil berbagai langkah untuk mengarusutamakan moderasi – mulai dari program pendidikan, dialog lintas iman, penegakan hukum, hingga pemanfaatan media sosial. Hasilnya mulai tampak meski perlahan; setidaknya wacana toleransi dan anti-kekerasan kini lebih sering diperbincangkan dan dijadikan arus utama diskursus publik.

Sebagai simpulan, *moderasi beragama* adalah investasi jangka panjang bagi terciptanya perdamaian dan persatuan. Ia bukan sekadar jargon, tetapi harus terwujud dalam sikap dan kebijakan nyata. Moderasi beragama tidak mengajak umat meninggalkan ajaran agama, justru mendorong internalisasi esensi paling mulia dari agama tersebut, yaitu menghormati kehidupan dan martabat sesama manusia. Dengan moderasi, perbedaan keyakinan dapat dirayakan sebagai kekayaan kolektif, bukan dijadikan alasan permusuhan. Bagi Indonesia, yang masyarakatnya sangat beragam, moderasi beragama ibarat perekat kebangsaan yang menjaga *Bhinneka Tunggal Ika* tetap hidup. Secara global, moderasi beragama juga adalah kontribusi terhadap peradaban dunia agar konflik atas nama agama dapat dikurangi.

Rekomendasi ke depan, semua pemangku kepentingan hendaknya terus memperkuat sinergi. Pemerintah perlu konsisten pada kebijakan yang adil dan inklusif, lembaga pendidikan mencetak generasi berwawasan toleran, tokoh dan ormas menjadi teladan kedewasaan beragama, dan setiap individu melatih empati serta keterbukaan. Jika ekosistem ini dapat dijaga, maka cita-cita mewujudkan masyarakat yang rukun dalam keragaman bukanlah utopia. Seperti kata pepatah, “*Perbedaan itu rahmat*”, dan moderasi beragama adalah cara kita mengelola rahmat perbedaan itu untuk kebaikan bersama. Dengan moderasi, agama akan benar-benar menjadi rahmat bagi semesta, rahmatan lil ‘alamin, dan bukannya sumber perpecahan.

Pada akhirnya, masa depan kerukunan di Indonesia dan dunia sangat ditentukan oleh pilihan kita hari ini: apakah tetap terjebak dalam sekat-sekat sempit, atau melangkah maju di jalan moderasi yang menjunjung toleransi. Berdasarkan paparan di atas, sudah sepantasnya kita memilih jalan moderasi beragama demi kedamaian dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Abdel-Fattah, R., & Krayem, M. (2021). Off script and indefensible: The failure of the ‘moderate Muslim.’ In *Unsettled Voices* (pp. 38–52). Routledge.
- Achilov, D., & Sen, S. (2017). Got political Islam? Are politically moderate Muslims really different from radicals? *International Political Science Review*, 38(5), 608–624.
- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). Religious moderation in Indonesian higher educations: literature review. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 203–231.
- Ahyar, M. (2019). Aksi Bela Islam: islamic clicktivism and the new authority of religious propaganda in the millennial age in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 1–29.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Haryani, E. (2019). Intoleransi dan resistensi masyarakat terhadap kemajemukan: studi kasus kerukunan beragama di kota Bogor, Jawa Barat. *Harmoni*, 18(2), 73–90.
- Hidayah, E. N. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat nasionalisme untuk kemajuan Indonesia. *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 9(02), 37–45.

Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer

- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48.
- Jubba, H., Awang, J., & Sungkilang, S. A. (2021). The challenges of Islamic organizations in promoting moderation in Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6(1), 43–54.
- Ma'mun, S., Nuroniyah, W., Salim, M. A., Maula, B. S., & Shodikin, A. (2025). Religious Moderation within Indonesian Diaspora in Australia's Secular Society. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 153–172.
- Muslim, B. (2023). Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah. In *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah*. Bandar Publishing.
- Muzaky, I. A. (n.d.). *Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Analisis Moderasi Beragama Sebagai Paradigma Teologi)*.
- Nafsi, B. I., & Octavia, L. N. (2024). ANALISIS LITERATUR TENTANG INOVASI LAYANAN PERPUSTAKAAN ERA DIGITAL: TINJAUAN KOMPREHENSIF. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(2), 182–190.
- Ri, T. P. K. A. (2019). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Robet, R., Fitri, M. R., & Kabelen, M. C. S. (2023). The State and Human Rights under Joko Widodo's Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2286041.
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi beragama dan harmonisasi sosial*. Lekkas.
- Ulama, M. T. N. (2015). Dinamika Otoritas Ulama Perempuan Indonesia di Ruang Publik (Kebangkitan Nyai Dalam Komunitas Muslim Tradisional Nahdlatul Ulama). *Muhammad Khodafi, Rizal Darwis, M. Khusna Amal*, 76.

